

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Biyes Nurul Atika

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan keuangan Negara, Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu bentuk dana dekosentrasi pendidikan, sehingga dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana BOS dibutuhkan agar dana yang dialokasikan oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka program pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan adanya dana BOS diharapkan masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa adanya kendala biaya. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan ialah Inspektorat. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji mekanisme pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terhadap penyelenggaraan dana BOS dan menemukan model pengawasan inspektorat yang akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengawasan yang akuntabel untuk mengawasi dana BOS dalam adalah audit yang sesuai dengan standar audit menurut Peraturan Menteri Pemeberdayaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang meliputi standar pelaksanaan, standar pelaporan serta standar tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ketiga standar tersebut menjadi tolak ukur akuntabilitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Dalam membangun akuntabilitas pengawasan dana BOS oleh Inspektorat, di Lampung Tengah dilakukan dengan cara audit regular atau berkala dengan dua bentuk pengawasan, yaitu Penjamin Kualitas (*quality assurance*) dan jasa konsultasi (*Consulting*). Bentuk *assurance* meliputi audit, evaluasi, reviu dan monitoring, sedangkan bentuk *consulting* meliputi konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Lampung Tengah telah memenuhi tiga standar dalam mengukur akuntabilitas pengawasan APIP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap penyelenggaraan dana BOS sudah akuntabel.

Kata kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Dana BOS, Inspektorat

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF THE INSPECTORATE'S SUPERVISION OF THE SUPERVISION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS IN LAMPUNG TENGAH

By

Biyes Nurul Atika

The School Operational Assistance Fund is a fund intended for non-personnel costs for primary and secondary education units. The School Operational Assistance Fund is a form of education deconcentration fund, so that its implementation requires supervision. One of the institutions authorized to carry out supervision is the Inspectorate. Using a normative approach, this study examines the supervisory mechanism carried out by the Central Lampung Regency Inspectorate for the administration of BOS funds and finds an accountable supervisory model for the inspectorate. The results of the study indicate that the accountable inspectorate supervision model is in accordance with the performance audit standards according to Regulation Of Ministry Of State Apparatus Utilization And Bureaucratic Reform Number 05 of 2008 About Auditing Standards Of Government Internal Control Apparatus which includes implementation standards, reporting standards and standards for follow-up on inspection results. The three standards become a benchmark for accountability in the supervision of the Central Lampung District Inspectorate. Supervision of BOS funds by the Inspectorate in Central Lampung is carried out by means of regular or periodic audits with two forms of supervision, namely quality assurance and consulting services. The form of assurance includes audit, evaluation, review and monitoring, while the form of consulting includes consultation, socialization and assistance. The audit carried out by the Central Lampung Inspectorate has met three standards in measuring APIP's oversight accountability. Therefore, this study concludes that the supervision carried out by the Inspectorate on the administration of BOS funds is accountable.

Keywords: Supervision, Accountability, Inspectorate